

**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DIBIDANG
KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2012-2015**

SKRIPSI



Oleh
HERNILASARI
NIM 105710207314

**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DIBIDANG
KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2012-2015**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh

HERNILASARI

NIM 105710207314

**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT. Karena kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami memohon pertolongan, Sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada :

Ayah dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku saudaraku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku, terima kasih atas semuanya.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Pengeluaran Pemerintah Dibidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2015"

Nama Mahasiswa : Hernilasari

No. Stambuk/NIM : 105710207314

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi Ini Telah Selesai Diujikan Di Depan Penguji Pada Hari Rabu Tanggal 3 Juli 2019 Di Gedung Iqra Lantai 8 Aula Mini Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Asdi., MM
NIDN : 0026126103

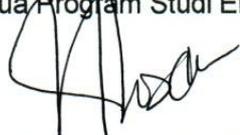

Asdar, SE., M.Si
NIDN : 0903039102

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program Studi EP


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM.: 903078


Hj. Naidah, SE., M.Si
NIDN : 0010026403



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Hernilasari NIM : 105710207314, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/60201/091004/2019, Tanggal 01 Dzulqaidah 1440 H/ 03 Juli 2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor UNISMUH Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE., M.Si (.....)
2. Dr. H. Muh. Rusydi, M.Si (.....)
3. Dr. Andi Jam'an, MM (.....)
4. Asdar, SE., MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NIM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama : Hernilasari
Stambuk : 105710207314
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : "Analisis Pengeluaran Pemerintah Dibidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2015"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**HERNILASARI
NIM : 105710207314**

Mengetahui,



Ketua Program Ekonomi
Pembangunan

**Hi. Naidah, SE., MM
NIDN : 0010026403**

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap selain ungkapan puji syukur kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayahnya_Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini, dan tak lupa pula mengirimkan salawat dan tazlim kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi Revolusioner sejati yang mampu merobek-robek bendera kekafiran dan mengkibarkan bendera ke islam, dan berkat beliau kita mampu merasakan sesuatu yang dulunya gelap gulita sampai sekarang kita mampu merasakan sesuatu yang terang benderang seperti sekarang ini.

Sembah sujud dan rasa terima kasih yang sedalam-dalam penulis hanturkan kepada ayahanda **BAHARUDDIN** dan ibunda **BASSE** yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus dengan merelakan segalanya demi gemerlapnya masa depan penulis semoga diberi pahala yang berlipat ganda dan tetap berada dalam lindungan_Nya Allah SWT dan terkhusus untuk Ibunda semoga di lapangkan kuburannya dan mendapatkan tempat yang di hidayakan yaitu surga oleh Allah SWT karena berkat ibu lah yang tak pernah mengenal lelah memberikan pemahaman tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai sejauh ini,dan juga kepada saudara **Rusdi**, serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak olehnya itu merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **DR.H.Abd.Rahman Rahim, SE.,MM.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rosulong, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj.Naidah, SE.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.
4. Bapak **Drs. ASDI,MM.**selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak **Asdar, SE.,M.Si.** selaku pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktunya tanpa lelah memberi masukan dan menuntun penulis dalam merampungkan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen** beserta seluruh **Staff** Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis.
7. **Bapak Gubernur** dan **Bapak Wakil Gubernur** Sulawesi Selatan beserta Staf yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kota Makassar, terima kasih banyak pak.
8. Kepada pimpinan kantor **Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya penyediaan dalam menyusun skripsi saya.
9. Terima kasih Kepada Sahabatku **Sulkipli, Sulkadri, Mouliani, Nur Hikmah**, dan juga untuk sepupu adinda **Miftahul Rahma** dan **Muhammad Harbi** yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya angkatan 2014 kalian adalah teman terbaik.

Juga kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih, walau namanya tidak disebutkan diatas semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Suatu kewajaran apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis menyadari akan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan financial, baik dalam penyediaan literatur maupun dalam pengolahan data.

Dengan kata ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik namun kesalahan tak bisa terhindarkan karena penulis dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan itu penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini olehnya itu masukan dari berbagai pihak khususnya pembaca, baik berupa kritikan maupun saran senantiasa diharapkan dan akan diterima dengan senang hati.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dengan iringan doa serta harapan bermanfaat bagi pembaca dan penulis utamanya.

Makassar, 8 Mei 2018

Penulis



ABSTRAK

HERNILASARI.2019. Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2015. **Jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Asdi.. Pembimbing II Asdar.**

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis Mengetahui Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Populasi sekaligus juga merupakan sampelnya yaitu data pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan data pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

This researcher aims to analyze Knowing government expenditures in the health sector on the economic growth of South Sulawesi. The population is also a sample, namely data on government expenditure in the health sector and data on South Sulawesi economic growth in 2012-2015. The data collection technique used is library research (libariy research). The data analysis method used is quantitative descriptive analysis. The research results show that government spending in the health sector has an effect on South Sulawesi's Economic Growth.

Keywords: Government, Expenditures and Economic Growth.



DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Teori	4
1. Pembangunan Daerah.....	4
2. Pengeluaran Pemerintah	8
3. Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan	16
4. Pertumbuhan Ekonomi	17
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Konsep	24
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sumber Data	28

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Populasi dan Sampel.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan	33
1. Keadaan Geografis Sulawesi Selatan	33
2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan	36
B. Hasil Penelitian	39
C. Hasil Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan	34
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 2.3. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	36
Tabel 2.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	37
Tabel 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	39
Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Produk domestik Regional Bruton Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	40
Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran Kesehatan, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan Hasil Selisi	42
Tabel 2.8. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	43
Tabel 2.9. Laporan Realisasi anggaran Dinas Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Kerangka pikir27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama hampir setengah abad, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonomi dan politisi dari semua negara, baik negara-negara kaya maupun miskin, yang menganut sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun campuran, semua mendambakan dan mengandalkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Masyarakat ekonomi dapat bernilai positif yang berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan, sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang terletak di Jazirah Pulau Sulawesi. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Sulawesi Selatan memiliki 21 Kabupaten yang terdiri dari 304 kecamatan, 783 kelurahan dan 2.240 desa. Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Provinsi yang terletak diantara posisi barat dan timur

Indonesia dan terkenal dengan sebutan gerbang dari Kawasan Timur Indonesia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *Social Overhead Capital (SOC)* yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektorkesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan periode 2012-2015.
2. Menganalisis pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan periode 2012-2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis khususnya pada ilmu ekonomi studi pemnangunan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kebijakan bagi BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumberdaya manusia dengan meningkatkan ualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikutbeberapateoritentangperencanaanpembangunandaerah:

Menurut Jhingan (2000:24). Bahwa “pembangunan daerah merupakan suatu usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan”.

Sedangkan:

Menurut Syahroni (2002:3). Bahwa pembangunan daerah adalah “kegiatan yang dilakukan secara terstruktur yakni dengan merumuskan suatu kegiatan pembangunan daerah yang teratur dari berbagai pelaku, baik itu umum maupun pemerintah”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah adalah merupakan suatu usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita yang dilakukan secara terstruktur yakni dengan merumuskan suatu kegiatan pembangunan daerah yang teratur.

Pada setiap pembangunan daerah harus dimulai dengan perencanaan pembangunan daerah yang juga berperan penting dalam pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah, sebagaimana dinyatakan:

Menurut Kuncoro (2012:3), bahwa “perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga menjadi penting dalam proses penyusunannya harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat”.

Sedangkan:

Menurut Riady, Deddy Supriadi Bratakusuma (2004:7) bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah “suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas”.

Didalam perencanaan daerah mempunyai lembaga khusus yaitu badan perencanaan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan tentu melalui beberapa proses perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sampai pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal tersebut adalah merupakan tata urutan hierarki yang bersifat *bottom up-top down*. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No.54 Tahun 2010. Pada umumnya perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengenal empat pendekatan, sebagaimana juga disebutkan di dalam permendagri No.54 Tahun 2010 Pasal 6, diantaranya adalah teknokratis, partisipatif, politis dan *top down-bottom up*.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regioonal disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

2. Pengeluaran Pemerintah

Dalam neraca anggaran dan pendapatan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya diunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang) angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut :

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi,

pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pengeluaran Pembanguna

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Menurut Mangkosoebroto (1993:169), bahwa Pengeluaran pemerintah adalah “hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

Menurut Dumairy (1999:56), bahwa pengeluaran pemerintah adalah “Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian. Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

1. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju”.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan juga dapat dilihat dari komposisi pengeluarannya. Dengan demikian efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu indikator tertentu melainkan dari beberapa indikator secara bersama-sama.

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan harus memperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, akan tetapi sebagaimana juga diketahui pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.

Menurut Mangkoesoebroto (2002, hal 170), bahwa “Hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya”.

Menurut Dumairy (2006, hal 167), bahwa “Ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalumeningkat. Kelima penyebab tersebut adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah Hubungan perkembangan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahananyang mengiringi perkembangan pemerintah.

Salah satu upaya untuk menstabilkan perekonomian yaitu melalui pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan menciptakan tingkat kesempatan kerja yaitu tinggi tanpa adanya inflasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengusahakan agar keseluruhan pengeluaran masyarakat dapat mencapai atau mendekati tingkat produksi maksimum yang dapat diciptakan oleh masyarakat.

Menurut Sadono Sukino (1985:30), bahwa “Dalam merealisasikan tujuan itu pemerintah dapat melaksanakan salah satu atau gabungan dari dua jenis kebijakan fiskal yang dapat dijalankan:

- a. menaikkan pajak pendapatan rumah tangga, kebijakan ini akan mengakibatkan jumlah pendapatan yang dapat di belanjakan oleh masyarakat berkurang, sehingga akan mengakibatkan penurunan dalam tingkat konsumsi masyarakat.

b. mengurangi pengeluaran pemerintah itu sendiri, sehingga dapat menciptakan kelebihan dalam anggaran belanjanya, pengurangan ini akan menurunkan keseluruhan pengeluaran masyarakat, dengan demikian dapat mengurangi atau menghapuskan tekanan inflasi yang dihadapi”.

Bagi negara yang sedang berkembang, pemerintah umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, sehingga jumlah saving mereka menjadi kecil. Oleh karena itu, tanpa campur tangan pemerintah, kecil kemungkinan suatu perekonomian dapat dilaksanakan investasi netto yang cukup besar agar dapat meningkatkan kapasitas produksi nasionalnya, sehinggalah taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Menurut Suparmoko (1997:25), bahwa “Keharusan campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan perekonomian disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemaha yang relevan dari mekanisme pasar Yaitu :

a. Distribusi pendapatan yang tidak merata

Mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis mempersempit kesenjangan distribusi pendapat yang terjadi dalam masyarakat. Untuk distribusi pendapat yang lebih merata diperlukan adanya campur tangan pemerintah.

b. Adanya barang-barang kolektif

Barang kolektif atau barang publik barang-barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui jual beli pasar. Barang atau jasa

semacam ini harus disediakan sebagai suatu keseluruhan tidak disediakan secara individual. Barang tersebut mempunyai sifat non rivalry (tidak bersaing) atau konsumsi seseorang tidak akan mengurangi persediaan barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok orang.

c. Resiko pembiayaan yang besar

Besarnya usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai resiko yang berat tidak akan dijalankan oleh swasta. Misalnya untuk mendirikan sumber tenaga nuklir diperlukan biaya penelitian dan waktu yang lama untuk memperoleh manfaat. Dalam hal ini pemerintah yang cocok untuk melaksanakannya, karena usaha tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sementara biaya yang dibutuhkan sangat besar.

d. Sifat-sifat monopoli

Beberapa usaha-usaha tertentu sebaiknya diusahakan dengan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Karena monopoli menimbulkan social loss, maka kegiatan ini haruslah dihasilkan oleh pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah akan timbul kerugian sosial yang besar dalam masyarakat karena harga terlalu tinggi dan produk yang terlalu sedikit.

e. Timbulnya inflasi dan deflasi

Mekanisme pasar tidak dapat tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis. Dalam hal ini pemerintah dapat mencegah timbulnya inflasi dan deflasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kebijakan fiskal penstabil otomatis atau disebut juga stabilisator terpasang:

Menurut Lipsey (1990:36), “adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan *autonomous* pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi”.

Tiga bentuk penstabil otomatis yang utama adalah sebagai berikut :

a. Pajak

Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan disposable yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan mengkonsumsi marginal tertentu dari pendapatan disposable, pajak langsung mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional.

b. Pengeluaran pemerintah

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklus. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidak-stabilan siklus pada seluruh

pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian.

c. Transfer pemerintah

Transfer pemerintah contohnya berupa jaminan sosial, jaminan kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan sebagai stabilisator terpasang cenderung menstabilkan pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang. Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya, dan orang lain. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil, dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubungan dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas baginegara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminankesehatan bagi setiap penduduknya. Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahapperkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebihbanyak sarana publik seperti

kesehatan untuk meningkatkan produktifitasekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancangedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemeritah.

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemeritah.

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005:53) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektorkesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatankinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik

selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya menjelaskan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misal satu tahun atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merepresentasikan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Beberapa faktor penting yang dianggap berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara diantaranya adalah:

a. Tanah dan Kekayaan Alam

Faktor tanah dan kekayaan alam merupakan faktor yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Negara dengan kekayaan alam yang tinggi dan memiliki nilai ekonomi tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam.

Sumber alam atau kekayaan alam dapat menarik investor untuk membangun sejumlah industri. Nilai ekonomi dari kegiatan produksi pengolahan kekayaan alam ini dapat menjadi basis pengembangan perekonomian jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia dimulai dari sektor pertambangan minyak bumi. Namun demikian,

perkembangan ekonomi suatu negara tidaklah berarti sangat bergantung pada faktor tanah dan kekayaan alam. Beberapa negara justru dapat berkembang perekonomiannya bukan dari sektor pertambangannya. Negara Jepang dan Belanda merupakan contoh negara yang dapat tumbuh walaupun tidak memiliki kekayaan alam yang cukup namun dapat berkembang dengan pesat.

b. Mutu Tenaga Kerja dan Penduduk

Mutu tenaga kerja dan masyarakat suatu negara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan penduduk akan mampu meningkatkan produktifitas yang tinggi. Tingkat produksi akan bertambah tinggi.

Selain itu, jumlah penduduk juga akan mempengaruhi cakupan pangsa pasar menjadi lebih luas. Jumlah penduduk yang lebih banyak akan mendorong meningkatkan sisi permintaan. Peningkatan sisi penawaran akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksinya. Dengan demikian, peningkatan mutu tenaga kerja dan jumlah penduduk akan menciptakan dorongan terhadap pertumbuhan produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

c. Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang modal menjadi penting dalam perkembangan ekonomi karena dengan barang modal sebagian produk dari berbagai industri dihasilkan. Barang modal dapat mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Jumlah barang modal akan menentukan jumlah produk yang

akan dihasilkan. Semakin bertambah barang modal semakin tinggi produksi yang dihasilkan dalam suatu perekonomian.

Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan peran yang sangat penting dalam memproduksi barang atau produk secara efisien. Sejumlah negara dapat meningkatkan perekonomiannya terutama disebabkan oleh kemajuan teknologinya. Teknologi memberikan beberapa pengaruh positif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi mampu mempertinggi efisiensi suatu produksi, mampu menciptakan barang modal baru, dan mampu menghasilkan barang dengan mutu tinggi yang bernilai ekonomi tinggi.

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat perkembangan ekonomi yang cukup serius di beberapa negara berkembang. Kebiasaan yang secara tradisional dianut oleh masyarakatnya menolak untuk menggunakan cara atau alat produksi yang lebih produktif dan efisien. Pada masyarakat demikian akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Namun demikian, beberapa negara memiliki masyarakat dengan sikap yang dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pada masyarakat yang memiliki sikap hemat dan menabungkan uangnya untuk investasi. Diketahui bahwa investasi memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengingat Indonesia yang mengalami krisis pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 membawa akibat buruk pada perekonomian dalam negeri.

Maka pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengacu usaha-usaha yang mengarah kepada pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian regional dan nasional melalui kebijakan dengan menambah anggaran pengeluaran.

Menurut Sadono Sukirno (1994:10). Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah "proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah".

Menurut Todaro (2005:44), "Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam".

Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan Swan (1956:44) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak.

Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, pada umumnya para ahli ekonomi memberikan pengertian yang sama pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sebagai kenaikan

dalam pendapatan per Kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu perencanaan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tetapi beberapa ahli ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Sukirno (1997:50) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai:

1. Peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi terjadi atau tidak.

B. Tinjauan Empiris

Kemenkeu (2017), dengan judul "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015" Pengeluaran kesehatan juga terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengeluaran di sektor kesehatan akan dibagi ke berbagai subsektor, antara lain obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana serta kesehatan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk

memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Najiha Habibi Siregar (2009), dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” mengkaji tentang pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Ia menyimpulkan bahwa “ada hubungan yang kuat dan positif antara penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara”.

Rumate (2015), dengan judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di kabupaten kutai timur” Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Kuncoro (2013), dengan judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di kabupaten kutai timur” Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. (IPM) dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Konsep

Menurut teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave tahap-tahappembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasipemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan dan kesehatan dalam hal ini terbagi dalam perumahan dan transportasi. Pada tahap selanjutnya peran pemerintah semakin berkurang

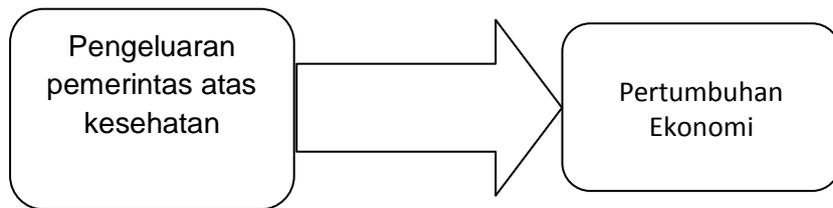
dan peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial. Melalui pengeluaran pemerintah dapat memberikan kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan di mana perbaikan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Perbaikan kualitas sumber daya manusia, menurut Mankiw dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aspek-aspek perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sektor-sektor tersebut dapat direalisasikan pemerintah melalui pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dalam ketiga sektor tersebut pada jangka panjang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kemudian akan meningkatkan efisiensi produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor yang dianggap penting. Sektor-sektor fundamental yang menjadikan saluran pengeluaran pemerintah adalah pendidikan dan kesehatan.

Sektor-sektor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus negara yang diteliti. Negara-negara Eropa misalnya lebih banyak meneliti pengeluaran pemerintah atas kesejahteraan, pendidikan, dan pertahanan. Serupa juga dengan negara-negara Timur Tengah yang rawan perang, pengeluaran pemerintah terhadap sektor pertahanan keamanan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Donald N dan Shuanglin (1993) membahas pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesejahteraan dan keamanan diberbagai negara maju dan negara sedang berkembang. Hasil yang didapat adalah sektor pendidikan dan keamanan berpengaruh positif dan sektor kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Widodo (2010) menjelaskan mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

Hasil yang diperoleh adalah pengeluaran pemerintah sektor publik seperti yang menjadi pembahasan penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Sampai saat ini sangat sedikit penelitian ilmiah dengan studi kasus Indonesia yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah atas sektor fundamental pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian terdahulu masih sangat beragam mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dalam sektor publik terutama sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.1
Bagian Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk pengamatan atas suatu hal yang biasa dinyatakan dalam angka atau bilangan hasil perhitungan seperti menghitung, mengukur dan menimbang. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan tepatnya pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun situs pada penelitian ini yaitu pada Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing daerah. Penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan agar hasil dari penelitian pun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang digunakan berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang lain.

Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebagai variabel independen.

1. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan di sektor kesehatan. Anggaran kesehatan dinyatakan dalam miliar rupiah pertahun.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh melalui pengisian kuesioner, wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian tentang analisis pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi sumber-sumber hukum, peraturan dan konsep mengenai analisis pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk suatu masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi bukan hanya sekedar

jumlah yang ada pada obyek-subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karekteristik yang dimiliki oleh subyek-obyek itu. Populasi dalam penelitian ini Sumber data adalah tempat diperolehnya data secara langsung melalui Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi sulawesi selatan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel dilakukan melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain - lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing daerah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara cermat terhadap variabel yang diteliti, pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sebagai bahan informasi atau data penelitian.

2. Interview indepth (wawancara mendalam), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada beberapa pegawai pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian baik berupa dokumen, tempat, dan waktu pelaksanaan.

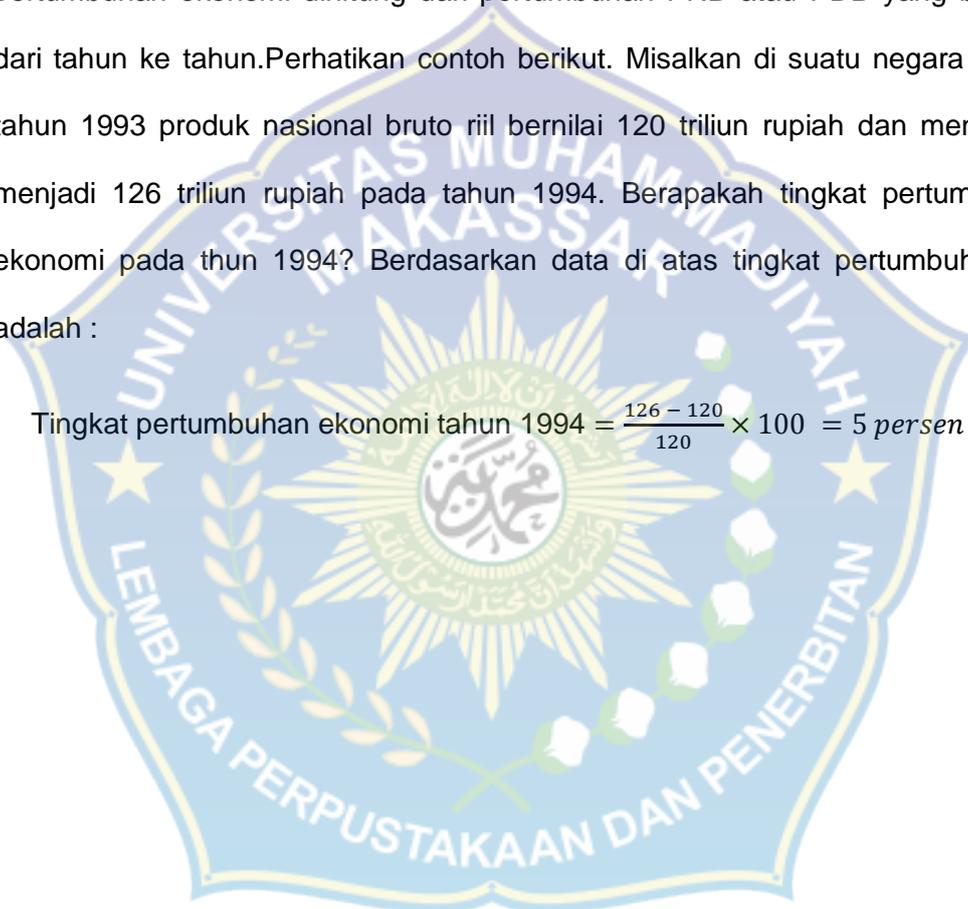
G. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi pendapatan nasional. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang diciptakan dalam satu tahun tertentu atau perubahannya dari tahun ketahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam merubah tingkat kegiatan ekonomi dan kepesatan pertumbuhannya. Mengukur prestasi kegiatan ekonomi produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional atau pendapatan nasional diatas dibedakan dari dua pengertian : Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Nasional yang diwujudkan oleh *warganegara* suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto, sedangkan Produk Domestik Bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh *penduduk* dalam suatu negara. Dari arti pengertian PNB dan PDB dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut pada akhirnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi data produk nasional dapat pula digunakan untuk ⁽¹⁾ menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, dan ⁽²⁾ menentukan tingkat

kemakmuran masyarakat dan perkembangannya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu PNB dan PDB yang dihitung menurut harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap, yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat (persentasi pertambahan) pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PNB atau PDB yang berlaku dari tahun ke tahun. Perhatikan contoh berikut. Misalkan di suatu negara dalam tahun 1993 produk nasional bruto riil bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat menjadi 126 triliun rupiah pada tahun 1994. Berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994? Berdasarkan data di atas tingkat pertumbuhannya adalah :

$$\text{Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1994} = \frac{126 - 120}{120} \times 100 = 5 \text{ persen}$$



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan

1. Keadaan Geografi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah Provinsi di Indonesia, yang terletak dibagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ}12' - 80^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya $62.482,54 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah timur : Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Sebelah selatan : Laut Flores
4. Sebelah barat : Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Secara geografis wilayah Sulawesi Selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Barat di bagian Utara, selat Makassar di bagian Barat, teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, dan Laut Flores di sebelah Selatan. Sulawesi Selatan memiliki 4 danau yakni Danau Tempe di kabupaten Wajo, Danau Sidenreng di kabupaten Sidrap, Danau Matano dan Towuti di kabupaten Luwu. Tercatat terdapat 7 gunung dan pegunungan yang berada di Sulawesi Selatan dengan gunung Rantemario (3.470 mdpl) adalah gunung tertingginya terletak di antara kabupaten Luwu dan Enrekang. Sungai yang mengalir di wilayah ini sekitar 65 aliran sungai, dengan sungai terpanjang adalah Sungai Saddang (150 km) yang mengalir melalui kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang dan Polewali. Terdapat empat kategori lahan di Sulawesi Selatan yaitu, Dataran

Rendah yang meliputi hampir semua kabupaten/kota. Dataran tinggi meliputi kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Sinjai, Gowa, Bone, dan sebagian wilayah Sidrap, Wajo, Pinrang, Maros, Pangkep dan Pare-pare. Wilayah perairan dan pantai meliputi kabupaten/kota yang terbentang di pesisir pantai Timur dan pantai Barat dan laut dalam yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Selayar. Secara administratif merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud membentang ke utara dari ujung timur laut Sulawesi.

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam, pula. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Kota Makassar menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah penduduk kota Makassar 1.342.826 jiwa, lalu tahun 2013 laju pertumbuhan meningkat 1,57% menjadi 1.429.242 jiwa, kan tetapi pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 0,16% hingga jumlah penduduknya hanya meningkat menjadi 1.449.401 jiwa, akan tetapi pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 1,39% hingga jumlah penduduknya hanya meningkat menjadi 1.469.601 jiwa.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2012-2015

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1	Selayar	124.553	127.220	128.744	130.199
2	Bulukumba	400.90	404.896	407.775	410.485
3	Bantaeng	179.505	181.006	182.283	183.386
4	Jeneponto	348.138	351.111	353.287	355.599

5	Takalar	275.034	280.590	283.762	286.906
6	Gowa	670.465	696.096	709.386	722.702
7	Sinjai	232.612	234.886	236.497	238.099
8	Maros	325.401	331.796	335.596	339.300
9	Pangkep	311.604	317.110	320.293	323.597
10	Barru	168.034	169.302	170.316	171.217
11	Bone	728.737	734.119	738.515	742.912
12	Soppeng	226.202	225.512	225.709	226.116
13	Wajo	389.552	390.603	391.980	393.218
14	Sidrap	277.451	283.307	286.610	289.787
15	Pinrang	357.095	361.293	364.087	366.789
16	Enrekang	193.683	196.394	198.194	199.998
17	Luwu	338.609	343.793	347.096	350.218
18	Tana Toraja	224.523	226.212	227.588	228.984
19	Luwu Utara	292.756	297.313	299.989	302.687
20	Luwu Timur	250.608	263.012	269.405	275.595
21	Toraja Utara	220.304	222.393	224.003	225.516
22	Makassar	1.362.606	1.408.072	1.429.242	1.449.401
23	Pare Pare	132.048	135.192	136.903	138.699
24	Palopo	152.703	160.819	164.903	168.894
Sulawesi Selatan		8.190.222	8.342.047	8.432.163	8.520.304

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Secara geografis Sulawesi Selatan membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang garis pantai mencapai 2.500 km. Luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang tercatat setelah pemekaran dengan Sulawesi Barat 46.083,94 km² yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota.

Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

Tabel 2.2

jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2012-2015

Tahun	Laki laki	Perempuan
2012	4.003.655	4.186.567
2013	4.071.434	4.270.613
2014	4.116.737	4.315.426
2015	4.160.975	4.359.329

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2012-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,1% disetiap tahunnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, olehkarena itu pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memperhatikan salah satu hal yang mendukung terciptanya pembangunan manusia, berikut Struktur ekonomi propinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.

Tabel 2.3

Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2015 (%)

NO	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	28.02	25.83	25.30	24.78
2	Pertambangan dan Penggalian	5.51	6.04	6.07	5.61
3	IndustriPengolahan	12.52	12.27	12.21	12.14

4	Listrik, Air, dan Gas	0.95	0.92	0.91	0.90
5	Bangunan	5.39	5.54	5.64	5.67
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16.70	17.37	17.63	17.98
7	Angkutan dan Komunikasi	7.96	8.01	7.89	8.12
8	Keuangan, Penyewaan, dan Pengawasan	6.24	6.63	6.92	7.38
9	Jasa – Jasa	16.71	17.42	17.44	17.41

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur dan mengevaluasi pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan salah satunya adalah rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Jumlah puskesmas yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 448, dan kota Makassar memiliki 43 puskesmas, Kota Pare-pare memiliki 6 dan Kota Palopo memiliki 12. Fasilitas kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 berjumlah 11.539 unit, lalu hingga tahun 2013 berjumlah 12.136 unit, lalu hingga tahun 2014 meningkat menjadi 12.141 unit, lalu hingga tahun 2015 meningkat menjadi 12.142 unit. Adapun fasilitas kesehatan yang dimiliki pada tahun 2015, yaitu 88 rumah sakit, 19 rumah bersalin, 448 puskesmas, 1.227 puskesmas pembantu, 408 puskesmas keliling, 9.657 psyandu, 143 klinik/balai kesehatan, dan 153 polindes.

Tabel 2.4

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2015

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
1	Selayar	1	14	64
2	Bulukumba	1	20	58

3	Bantaeng	1	13	22
4	Jenepona	1	18	55
5	Takalar	1	15	51
6	Gowa	2	25	119
7	Sinjai	1	16	62
8	Maros	2	14	24
9	Pangkep	1	23	60
10	Barru	1	12	34
11	Bone	4	38	70
12	Soppeng	1	17	44
13	Wajo	2	23	55
14	Sidrap	3	14	42
15	Pinrang	3	16	44
16	Enrekang	2	13	68
17	Luwu	1	21	104
18	Tana Toraja	2	21	31
19	Luwu Utara	2	14	49
20	Luwu Timur	2	15	59
21	Toraja Utara	2	25	27
22	Makassar	43	43	38
23	Pare Pare	5	6	0
24	Palopo	6	12	31
Sulawesi Selatan		90	448	1211

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan menurut kabupaten/kota sudah bagus dilihat dari jumlah rumah sakit, pusesmas, dan pusesmas pembantu yang banyak.

Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah fasilitas kesehatan kabupaten/kota se Sulawesi Selatan :

Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2012-2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit	96	84	88	88
Rumah Bersalin	86	46	19	19
Puskesmas	431	440	446	448
Puskesmas Pembantu	1.235	1.257	1.227	1.227
Puskesmas Keliling	421	445	408	408
Posyandu	9.183	9.401	9.657	9.657
Klinik/Balai kesehatan	87	236	143	143
Polindes	-	227	153	153
Sulawesi Selatan	11.539	12.136	12.141	12.142

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat ada perubahan dari tahun 2012 blum mempunyai fasilitas kesehatan seperti polindes, namun pada tahun 2013-2015 dapat dilihat bahwa sudah ada fasilitas polindes.

B. Hasil Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indicator penting untuk mengukur dan mengevaluasi pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan.

Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga tahun

2010. Maksud perhitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi yang nilainya telah bebas dari harga.

Tabel 3 berikut ini memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota se Sulawesi Selatan :

Tabel 2.6

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Persen), 2012-2015

N0	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
1	Kep. Selayar	7,88	8,18	9,01	8,81
2	Bulukumba	9,65	7,77	8,54	5,61
3	Bantaeng	9,67	9,00	8,33	6,63
4	Jeneponto	7,55	6,64	7,93	6,53
5	Takalar	6,58	8,80	9,76	8,40
6	Gowa	8,15	9,42	7,17	6,79
7	Sinjai	7,32	9,79	6,98	7,54
8	Maros	11,14	6,28	4,73	8,58
9	Pangkep	8,26	9,33	10,41	7,96
10	Barru	8,39	7,87	7,35	6,31
11	Bone	8,21	6,30	9,53	8,29
12	Soppeng	6,93	7,27	6,89	5,10
13	Wajo	6,50	6,92	9,67	7,05
14	Sidrap	8,93	6,93	7,87	7,98
15	Pinrang	8,51	7,27	8,11	8,24
16	Enrekang	7,30	5,84	5,99	6,89
17	Luwu	7,00	7,74	8,81	7,26
18	Tana Toraja	8,58	7,19	6,80	6,84
19	Luwu Utara	6,81	7,39	8,82	6,66
20	Luwu Timur	5,62	6,30	8,10	6,43
21	Toraja Utara	9,45	9,74	7,64	7,65

22	Makassar	9,64	8,55	7,39	7,46
23	Pare Pare	8,80	7,95	6,33	6,28
24	Palopo	7,00	8,02	7,05	6,45
Sulawesi Selatan		8,87	7,62	7,54	7,17

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota relatif homogen, pada tahun 2012 angka terendah di berada pada kabupaten luwuk timur dengan presentasi 5.62 dan yang tertinggi kabupaten maros dengan pesentase 11,14.

Pada tahun 2013 menunjukkan angka terendah di berada pada kabupaten Enrekang dengan presentasi 5.84 dan yang tertinggi kabupaten Sinjai dengan pesentase 9,79.

Pada tahun 2014 menunjukkan angka terendah di berada pada kabupaten Maros dengan presentasi 4,73 dan yang tertinggi kabupaten Pangkep dengan pesentase 10,41.

Pada tahun 2015 menunjukkan angka terendah di berada pada kabupaten Soppeng dengan presentasi 5.10 dan yang tertinggi kabupaten Selayar dengan pesentase 8,81.

Angka pertumbuhan penduduk :

Tahun 2012

$$7,65 - 8,87 = 1,22$$

$$\frac{1,22}{8,87} \times 100 = -13,7\%$$

Tahun 2013

Tahun 2014

$$7,62 - 7,54 = 0,08$$

$$\frac{0,08}{7,54} \times 100 = 1,06\%$$

Tahun 2015

$$8,87 - 7,62 = 1,25$$

$$\frac{1,25}{7,62} \times 100 = 16,4\%$$

$$7,54 - 7,17 = 0,37$$

$$\frac{0,37}{7,17} \times 100 = 5,16\%$$

Tabel 2.7
Laporan Realisasi Anggaran Kesehatan Laju Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto dan Hasil Selisi

Tahun	Realisasi Anggaran kesehatan	Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Selisi
2012	98,89%	8,87	-13,7%
2013	93,47%	7,62	16,4%
2014	98,49%	7,54	1,06%
2015	92,33%	7,17	5,16%

Sumber : Diolah dari data Primer 2019

Hasil selisi pertahun, pada tahun 2012 menunjukkan hasil presentasi - 13,7% dan tahun 2013 dengan hasil presentasi 16,4% sedangkan tahun 2014 dengan hasil presentasi 1,06% begitu juga tahun 2015 hasil presentasi 5,16%.

Langkah dan upaya pemerintah dalam menggalakkan otonomisasi daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong gerak roda pembangunan di daerah yaitu melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut lebih berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal ini sektor kesehatan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan dalam hal ini sektor kesehatan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji sementara anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

Anggaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan yang terealisasi dengan baik hal terlihat karena di sektor kesehatan dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.8

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	2012	2013	2014	2015
Anggaran	35.099.295.361	46.982.505.163,82	53.011.691.305,69	87.675.939.116,38
Realisasi	34.711.070.960	43.916.556.216	52.213.057.400	80.949.146.47

Persen	98,89%	93,477%	98,49%	92,33%
---------------	--------	---------	--------	--------

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Tabel diatas pengluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia tahun 2012 sebanyak Rp. 35.099.295.361 dan terealisasi Rp. 34.711.070.960 dengan persentase 98,89%. tahun 2013 sebanyak Rp. 46.982.505.163,82 dan terealisasi Rp. 43.916.556.216 dengan persentase 93,47%. tahun 2014 sebanyak Rp.53.011.691.305,69 dan terealisasi Rp. 52.213.057.400 dengan persentase 98,49%. tahun 2015 sebanyak Rp.87.675.939.116,38 dan terealisasi Rp. 80.949.146.47 dengan persentase 92,33%.

Berikut tabel Persentase Laporan Realisasi Dinas Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto :

Tabel 2.9
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Tahun	Persentase Realisasi Anggaran	Pertumbuhan Ekonomi
2012	98,89%	8,87
2013	93,47%	7,62
2014	98,49%	7,54
2015	92,33%	7,17

Sumber:Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2019 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Pada tabel diatas, Perkembangan antara variabel realisasi anggaran dinas kesehatan dan variabel tingkat persentase pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2015 provinsi Sulawesi Selatan. Persentase realisasi anggaran di tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar 98,89% dengan pertumbuhan Ekonomi 8.87, Sedangkan di tahun 2013 mengalami penurunan, di bandingkan tahun

sebelumnya dimana Presentasi realisasi anggaran 93,47% dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun diangka 7.62. Di tahun 2014 menunjukkan bahwa presentasi realisasi anggaran meningkat 98,49% dengan pertumbuhan Ekonomi menurun di angka 7.56 sedangkan di tahun 2015 kembali mengalami penurunan Presentasi realisasi anggaran sebesar 92,33% dengan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dengan angka 7.17.

Dari data pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan. Misalnya ,maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Slatan rata – rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita dimasing – masing tahun tersebut.

Sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Anggaran sektor kesehatan memang selalu lebih kecil, namun sejak tahun 2001 pengeluaran pemerintah atas kesehatan terus meningkat. Periode tahun 1969-1995 anggaran pemerintah atas sektor kesehatan cenderung konstan. Pemerintah orde baru kala itu tidak banyak mengeluarkan kebijakan di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan hanya terpusat pada kota-kota. Pada pemerintahan orde baru tidak banyak program kesehatan dicanangkan

selain program keluarga berencana dan beberapa pengentasan penyakit menular. Periode setelah krisis 1997/1998 merupakan momentum perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun mengalami penurunan hingga 3 persen dari tahun sebelumnya, namun setelah krisis pemerintah mengeluarkan program-program terkait perbaikan sektor kesehatan. Hal ini kemudian meningkatkan pengeluaran pemerintah atas kesehatan hingga 5 persen yaitu 2.333.981.318,75 rupiah pada tahun 1998 dan meningkat hingga 4.013.122.568,75 rupiah pada tahun 1999/2000.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi pendapatan nasional. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang diciptakan dalam satu tahun tertentu atau perubahannya dari tahun ketahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam merubah tingkat kegiatan ekonomi dan kepesatan pertumbuhannya. Mengukur prestasi kegiatan ekonomi produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional atau pendapatan nasional di atas dibedakan dari dua pengertian : Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Nasional yang diwujudkan oleh *warganegara* suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto, sedangkan Produk Domestik Bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh *penduduk* dalam suatu negara. Dari arti pengertian PNB dan PDB dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut pada akhirnya merupakan ukuran

mengenai besarnya kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi data produk nasional dapat pula digunakan untuk ⁽¹⁾ menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, dan ⁽²⁾ menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu PNB dan PDB yang dihitung menurut harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap, yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat (persentasi pertambahan) pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PNB atau PDB yang berlaku dari tahun ke tahun .

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kemudian dari analisis yang dilakukan juga menjelaskan bahwa tahun dasar ke tahun yang diamati berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik dimana pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan seperti pengadaan fasilitas kesehatan semakin baik untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah pada tahun 2012, 2013, dan 2015 paralel dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi khusus tahun 2014 realisasi pengeluaran tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa tdk berpengaruh.

B. Saran

Adapun saran yang akan diajukan adalah :

1. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus menyikapi dengan serius dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas rumah sakit dan lain-lain.
2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memperhatikan salah satu hal yang mendukung terciptanya pembangunan sumber daya manusia sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan berdampak pada peluasan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan

yang akan menciptakan kemajuan perekonomian dan peningkatan distribusi pendapatan dalam suatu negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Arda. 2016. *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*. (<https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/faktor-yang-mempengaruhipertumbuhan-ekonomi/>), diakses 16 Februari 2018 pukul 11.00 wita.
- Adriana.H 2015. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan, skripsi tidak diterbitkan.
- Ahmad Ma'ruf Dkk., 2008 - pertumbuhan ekonomi indonesia:determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 9, No. 1.
- Badan pusat statistik. 2012 Makassar Dalam angka Makassar in figures 2012. Kota Makassar provinsi sulawesi selatan dalam angka 2013.
- Badan pusat statistik. 2014 Makassar Dalam angka Makassar in figures 2014. Kota Makassar provinsi sulawesi selatan dalam angka 2015.
- Badan pusat statistik. 2015 Makassar Dalam angka Makassar in figures 2015. Kota Makassar provinsi sulawesi selatan dalam angka 2016.
- Badan pusat statistik. 2016 Makassar Dalam angka Makassar in figures 2016. Kota Makassar provinsi sulawesi selatan dalam angka 2017.
- Desi dwi bastias 2010. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia periode 1969-2009.
- Merang Kahang Dkk., 2016-Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur *Ekonomi, Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. ISSN: 1441-1713 Vol.18,No 2.
- Merlin Anggraeni 2017. analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia periode 1970-2015, fakultas ekonomi universitas negeri yogyakarta.
- Nugroho Suratno Putro. pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (study kasus pada kabupaten/kota diprovinsi jawa tengah)Fakultas Ekonomi Universitas Diponegor.
- Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo 2011.Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4.

Ridwan dalam Bagus Trianjaya 2012. Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Teori di Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMKN 2 Yogyakarta dan SMKN Wonosari. Jurusan pendidikan teknik mesin fakultas teknik universitas Negeri Yogyakarta 2012.

sri endang rahayu 2011. analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. jurnal manajemen & bisnis vol 11 no. 02 oktober 2011 issn 1693-7619, fakultas ekonomi universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tommy Prio Haryanto. 2013 - pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011, jurnal Analisis ekonomi pembangunan, ISSN: 2226-8235 Vol. 1, No 15.

Tri Haryanto, Unggul H dan Achmad Solihin. 2005. Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur. Majalah Ekonomi, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Wawan Darmawan 2014. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan hasil pertanian kabupaten Sinjai tahun 2008-2012, sripsi tidak diterbitkan.



RIWAYAT HIDUP



Hernilasari biasa di sapa dengan panggilan Nila lahir di Takalar pada tanggal 109 Mei 1995. Anak kedua dari 2 bersaudara hasil buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Baharuddin dan Basse.

Penulis mulai memasuki dunia pendidikan formal yang dimulai dari Sekolah Dasar pada tahun 1999 di SD Negeri Lassang II dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama MTs DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengikuti Program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.